

Hari Ini Ratusan Buruh Aksi di MK, Kawal Sidang Gugatan UU Ciptaker

JAKARTA (IM) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut ratusan buruh akan melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/12). Aksi tersebut dalam rangka mengawal sidang judicial review (JR) terhadap UU omnibus law tentang cipta kerja.

"Jadi besok (Rabu) tanggal 16 Desember, ada aksi massa buruh, ada ratusan orang di depan Mahkamah Konstitusi. (Aksi) jam 10.00-12.00," kata Said dalam jumpa persnya secara daring, Selasa (15/12).

Disamping itu, dia mengatakan bahwa aksi di lapangan ini nantinya akan diikuti oleh buruh-buruh yang tersebar di 25 Provinsi dan 200 Kabupaten/Kota. Dalam aksi di lapangan ini, Said mengklaim akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, seperti pembatasan jumlah serta jarak yang akan terjalin ke lapangan besok.

"Physical distancing jarak sampai 1,5 meter, kami

janji itu. Makanya jumlahnya hanya ratusan, 300 orang buruh. Kemudian memakai masker, dan kami siapkan masker ada ratusan masker disediakan, dan hand sanitizer juga akan kami siapkan benar itu," ujarnya.

Kendati demikian, secara bersamaan, dalam hal ini pukul 10.00-12.00, pihaknya juga akan melakukan aksi secara virtual. Said mengklaim, lewat aksi virtual ini ratusan buruh bisa ikut memperjuangkan dan menyuarakan aspirasinya.

"Mudah-mudahan bisa meruntuhkan dan menggetarkan hati nurani dan pikiran, tidak hanya hati nurani, pikiran rasionalitas para hakim mahkamah konstitusi mau mendengar suara rakyat bahwa rakyat menolak, meminta membatalkan omnibus law undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," tuturnya. "Jadi ada dua aksi. Aksi lapangan tetap di lapangan, kalau di Jakarta dipusatkan di Mahkamah Konstitusi, dan aksi virtual," katanya melanjutkan. ● osm

Satgas Pemburu Covid-19 Malah Dikunci di Dalam Kafe di Bekasi

KOTA BEKASI (IM) - Tim gabungan Satgas Pemburu Covid-19 dikunci di dalam kafe ketika sedang melakukan penindakan di tempat hiburan malam di Kota Bekasi. Mereka dikunci oleh pemilik kafe selama 30 menit.

Aksi penguncian anggota Satgas Pemburu Covid-19 di dalam kafe dibarengi Kanit Reskrim Polsek Pondok Gede Iptu Santri Dirga saat dikonfirmasi, Selasa (15/12). Awalnya, tim Satgas Pemburu Covid-19 yang terdiri dari Satpol PP, Koramil, dan Polsek Pondok Gede melakukan penindakan terhadap Kafe Tiffany di Jalan Raya Transyogi, Kota Bekasi, pada Minggu (13/12) pukul 00.30 pagi.

Kala itu, Satgas Pemburu Covid-19 menindaki kafe tersebut karena beroperasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan Pemkot Bekasi. "Mereka melanggar peraturanlah. Kita lihat rundown acarnya sampai jam 3 pagi," kata Dirga.

Selain itu, protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak tidak diterapkan para pengunjung. Karena situasi tersebut, Kapolsek langsung membubarkan para pengunjung. Saat ingin membubarkan pengunjung, rupanya pihak pengelola sudah mengunci pintu masuk.

"Pengunjung ada yang lapor ke kita rupanya pintu

sudah terkunci. Kok terkunci? Kita cek ternyata benar terkunci," jelas Santri.

Petugas langsung bertanya kepada petugas sekuriti soal keberadaan kunci tersebut. Namun, pihak sekuriti mengaku tidak tahu. Petugas lalu melayangkan pertanyaan yang sama kepada manajer kafe. "Kita tanya manajer, bilanganya kunci ada di waiters-nya. Kita tanya waiters-nya malah mengaku enggak pegang kunci," ucap Dirga.

Setelah dilakukan pencarian, polisi akhirnya menemukan kunci tersebut di salah satu meja waiters. Dirga langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa yang mengunci mereka di dalam. "Setelah kita cari tahu, ternyata ada pengunjung bos mereka. Setelah kita coba cari ternyata bosnya sudah pergi," ujar Dirga.

Dari hasil pemeriksaan, pemilik kafe tersebut rupanya sengaja mengunci pintu agar para pelanggan yang dipaksa membubarkan diri menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu. "Jadi pemilik kafe mau pelanggan bayar bill-nya dulu, biar pelanggannya diselesaikan dulu bill-nya," kata Dirga.

Dirga mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran Pemkot Bekasi agar kafe tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan perda yang berlaku. ● osm

Rekapitulasi Pelayanan Adminduk Se-Kota Bekasi Terjadi Peningkatan

KOTABEKASI (IM) - Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan hasil rekapitulasi pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan se-Kota Bekasi selama bulan November 2020, Senin (14/2).

Jenis Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi meliputi beberapa hal di antaranya, Perekaman KTP EL, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah, Surat Datang dan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan pada kantor kecamatan di wilayah Kota Bekasi.

Dalam rilis Humas Pemkot Bekasi, Senin (14/12) sore disebutkan, dari 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi terdapat jumlah total keseluruhan sebagai berikut :

1.KTP Elektronik meli-

puti; Perekaman 3.768 dan Pencetakan 20.061. Sedangkan untuk Suket tidak ada.0
2.Kartu Keluarga : 16.476
3.Akta Kelahiran : 4.162
4.Akta Kematian : 993
5.Surat Pindah : 5.692
6.Surat Kedatangan : 4441
7.Kartu Induk Anak : 5928

Melihat dari hasil rekapitulasi tersebut, pelayanan terbanyak ada di pencetakan KTP Elektronik dan pada masing-masing kecamatan untuk sementara tidak mengeluarkan Surat Keterangan pada KTP Elektronik.

Adanya peningkatan jumlah pelayanan di bulan November yang cukup signifikan dibanding dengan bulan Oktober lalu terlihat dari seluruh jumlah yang ada dan tercatat di atas. ● mdl

Kasatpol PP: Biar Satgas Covid-19 DKI yang Evaluasi PSBB

JAKARTA (IM) - Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Ibu Kota untuk mencegah penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir tahun.

Arifin menyebut, Satgas Covid-19 DKI Jakarta akan mengevaluasi penerapan PSBB transisi guna membahas permintaan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Pemprov DKI memperketat kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah pada 18 Desember hingga 8 Januari 2020.

"Nanti biar Satgas Covid-19 DKI yang mengevaluasi penerapan PSBB-nya. Apakah efektif atau tidak," kata Arifin saat dihubungi, Selasa (15/12).

Arifin mengatakan pihaknya belum bisa memasti-

kan apakah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menarik kebijakan rem darurat atau memperketat PSBB di Ibu Kota untuk mencegah penyebaran corona pada libur akhir tahun tersebut.

"Biar Satgas Covid-19 DKI yang evaluasi," katanya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya meminta kepada Anies untuk menyetujui kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19:00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan," ujar Luhut saat rakor penangan Covid-19 di DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali secara virtual, Senin 14 Desember 2020. ● ber

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



JAKPRO TERIMA ISO 37001:2016

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto (kanan) menerima sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) dari pihak Mutu International di Jakarta, Selasa (15/12). ISO 37001:2016 merupakan sistem manajemen anti penyuaan yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti suap.

Warganet Kecam Aksi Walk Out Anggota DPRD DKI Saat Rapat Paripurna

Aksi anggota DPRD DKI Jakarta rame-rame meninggalkan ruang rapat atau walk out saat Fraksi PSI menyampaikan pandangan umumnya saat rapat paripurna, sangat memalukan.

JAKARTA (IM) - Warganet mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap DPRD DKI Jakarta yang menentui kenaikan gaji. Warganet semakin kecewa setelah melihat aksi walk out hampir seluruh anggota DPRD DKI Jakarta ketika Fraksi PSI membacakan pandangannya yang menolak kenaikan gaji.

Aksi walk out anggota DPRD DKI ini terjadi saat rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12).

Di Twitter, suara-suara kekecewaan warganet terhadap DPRD DKI Jakarta bahkan masuk dalam daftar trending

topic. Pemerhati sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan Abdillah Toha melalui akun @AT_AbdillahToha menyebutkan bahwa anggota DPRD DKI sudah tidak memiliki rasa malu. "Urut malu politisi anggota DPRD DKI ini sudah putus. MALU sudah hilang dari kamus mereka. Hanya ada satu kata di benak saya. Menjijikkan," cuitnya, dikutip Selasa (15/12).

Sementara akun @suci-harto menulis, "HAI RAKYAT DKLILIHAT INI!! BUKA MATA LOE.... JANGAN BIARKAN ANAK-ANAK MUDA INI BERJUANG SENDIRIAN MEMBELA KALLIAN!!!!"

Warganet lainnya @ritsariana mencuit, "Anggota

DPRD DKI terlihat sekali hanya ingin ada di ruang sidang dgn acara yg enak dihatinya sj, yg menguntungkan bagi dirinya sj .. saya yakin mereka tau yg diinginkan PSI itu baik utk rakyat tapi mgn mereka merasa dirugikan.."

Sementara akun @ChaerulKI mencuit, "Rakyat DKI sdh mengeluarkan uang, tenaga, pikiran & waktu hanya utk memilih mrk agar bisa "duduk" di kursi DPRD & mendapat sebutan "Anggota Dewan Yang Terhormat" ... tp bgtu dh dapat semuanya koq "kursi" nya malah ditinggalin, apa bkn pengkhianatan ini namanya."

Politikus muda PSI Tsamara Aman melalui akun Twitter-nya @TsamaraDKI mengatakan, langkah mayoritas anggota DPRD DKI yang memperlakukan PSI dengan melakukan aksi walk out ketika Fraksi PSI menyampaikan pandangan resminya, merupakan risiko yang harus ditanggung partainya. Namun, dia justru merasa terhormat menjadi musuh bersama demi kepentingan rakyat.

"Risiko yang harus kami terima ketika berani menggagalkan rencana naik gaji & tunjangan anggota DPRD DKI sebesar Rp700 juta per bulan. Dimusuh karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan," cuitnya.

Kritikan juga dilontarkan salah seorang pendiri sekaligus politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha, Ia menyindir sikap para anggota DPRD DKI Jakarta yang meninggalkan ruang rapat atau walk out saat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berbicara di tengah rapat paripurna.

Ia menilai aksi para wakil rakyat tersebut memalukan. Terlebih lagi, aksi itu dilakukan karena sikap PSI sebelumnya yang menentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI.

"Ya itu sangat memalukan sekali. Anak-anak muda itu kan lagi berjuang untuk kritis, kemudian dipojokkan oleh partai besar. Bagaimana wakil

rakyat kok kelakuannya seperti itu," kata Abdillah Toha saat, Selasa (15/12).

Abdillah menegaskan bahwa sikap PSI yang bukubukaan soal anggaran fantastis untuk gaji dan tunjangan Anggota DPRD adalah sikap yang benar. Sebab, sudah seharusnya penyusunan APBD melibatkan masyarakat.

"APBD itu kan dalam bentuk perda, dan perda itu harusnya melibatkan publik, LSM atau pun ormas. Publik harus ditanya pendapatnya," kata Abdillah.

"Seharusnya kan bukan PSI yang membuka anggaran itu. Seharusnya DPRD membuka itu," sambung Abdillah yang pernah duduk sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009 itu.

Ia menegaskan sikapnya ini sekaligus mengkritisi para juniornya yang duduk di Fraksi PAN DPRD DKI. "Ya ini untuk semua lah, partai-partai yang enggak punya malu itu," katanya. ● osm

F-Gerindra Sebut Tak Ada Skenario 8 Fraksi di DPRD Lakukan Walk Out

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta S Andyka mengatakan, tidak ada skenario aksi walk out yang dilakukan serentak 8 fraksi di DPRD DKI Jakarta, saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna merupakan sikap pribadi dari anggota Dewan.

Andyka menegaskan, Fraksi Gerindra tidak pernah menginstruksikan anggotanya untuk walk out saat PSI akan membacakan pandangan umum fraksinya.

"Jadi jangan ini dikatakan bahwa sebagai sesuatu yang sudah diskenario. Karena dari kami dari Gerindra tidak menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi untuk melakukan walk out, tidak ada," kata Andyka, Selasa (15/12).

Dia menjelaskan, tidak semua anggota fraksinya yang hadir secara fisik dalam rapat tersebut keluar lantaran menolak pandangan umum yang akan disampaikan oleh PSI.

"Sempat ikut keluar juga walk out, tapi kan ke luarnya beda-beda. Artinya ada yang keluar karena mau ngerokok, karena mau buang air kecil, ada yang ke luar karena memang punya sikap yang sama," kata Andyka.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Jamaludin sebelumnya mengatakan aksi walk out dilakukan tanpa ada kesepakatan dengan anggota lain terlebih dahulu.

"Tidak, jadi ini tidak ada kesepakatan. Ini murni saya aja. Karena saya sudah kecewa dengan sikap-sikap seperti itu, apalagi ada bahasa bahwa DPRD ini merampok uang rakyat," kata Jamaludin.

Aksi walk out ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin. Jamaludin mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI.

Namun, keputusan Fraksi PSI untuk menyetujui RKT dibantah oleh DPW PSI sendiri. Itulah sebabnya jika pandangan umum dari fraksi PSI belum disetujui oleh DPW PSI, Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta.

Pernyataan itu disambut oleh tepuk tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut menghadiri rapat paripurna. Setelah menyampaikan pernyataannya, Jamaludin meninggalkan ruang rapat diikuti oleh anggota DPRD DKI yang lainnya, kecuali anggota Fraksi PSI.

Akan tetapi aksi ini tidak berjalan hingga selesainya rapat paripurna. Sesaat setelah Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad rampung membacakan pandangan umum Fraksi PSI, para anggota Dewan yang sebelumnya keluar kembali memasuki ruangan.

Ketika anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Jupiter mulai menyatakan pandangan umum fraksinya, para anggota DPRD yang walk out kembali menduduki kursi mereka.

Saat dihubungi secara terpisah, Jamaludin menjelaskan, aksi walk out ini bukan merupakan sikap partai, melainkan merupakan keputusan pribadi.

"Saya di sini mewakili rakyat, bukan mewakili partai. Namanya saya ke luar yang mungkin mereka juga (mengikuti)," ujar Jamaludin.

Dia berujar, aksi walk out dilakukan tanpa ada kesepakatan dengan anggota lain terlebih dahulu.

"Tidak, jadi ini tidak ada kesepakatan. Ini murni saya aja. Karena saya sudah kecewa dengan sikap-sikap seperti itu, apalagi ada bahasa bahwa DPRD ini merampok uang rakyat," kata Jamaludin. ● osm

Graha Wisata Ragunan Mulai Terisi Pasien Isolasi Covid-19

RAGUNAN (IM) - Graha Wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mulai terisi pasien isolasi mandiri Covid-19 dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG).

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Ranty Ariany mengatakan, pasien Covid-19 pertama masuk ke Graha Wisata Ragunan beberapa hari lalu.

"Masuk pertama tanggal 8 Desember 2020. Sejuah ini aktivitas di Graha Wisata Ragunan berjalan dengan lancar," ujar Ranty saat dihubungi, Selasa (15/12) siang.

Pasien-pasien Covid-19 di Graha Wisata Ragunan berasal dari rujukan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta dan Puskesmas di kecamatan. Ada pasien dari RSUD Pasar Minggu dan Kebayoran Baru. Sementara itu, ada dari Puskesmas Setiabudi dan Pesanggrahan. Total pasien isolasi mandiri di Graha Wisata

Ragunan berjumlah 14 orang. Di Graha Wisata Ragunan, pasien isolasi tak diperbolehkan ke luar dari kamar. Jika pasien ingin berolahraga, pengelola mempersilahkan pasien berolahraga di balkon kamar. Untuk pelayanan makan, pihaknya menaruh meja di depan kamar.

Makanan akan diletakkan atas meja untuk menghindari kontak fisik antara pengelola wisma dan pasien isolasi.

Sebanyak 76 kamar disiapkan oleh pengelola Graha Wisata Ragunan untuk menampung pasien isolasi mandiri Covid-19. Dari total kamar tersebut, Graha Wisata Ragunan bisa menampung sebanyak 152 orang.

Kamar-kamar di Graha Wisata Ragunan memiliki dua tipe kamar yaitu kapasitas 2 tempat tidur dan 6 tempat tidur dengan fasilitas seperti televisi, AC, dan kamar mandi di dalam. Ada juga 15 orang pegawai Graha Wisata Ragunan yang melayani kebutuhan pasien Covid-19 setiap shift.

Setiap shift dimulai pada pagi hingga sore hari lalu sore hari menuju pagi hari.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk salah satu wisma milik pemerintah untuk dijadikan tempat isolasi mandiri pasien Covid-19. Salah satu wisma yang ditunjukkan yakni Graha Wisata Ragunan. Selain di Ragunan, Pemprov DKI Jakarta Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMI) di Jakarta Timur.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 979 tahun 2020 tentang Lokasi Isolasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penanganan Covid-19. Keputusan tersebut diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 22 September 2020.

Lokasi isolasi mandiri itu tersebar di tiga kota yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Anies menyampaikan biaya pengelolaan lokasi isolasi mandiri itu akan menggunakan APBD DKI Jakarta. ● ber

IDN/ANTARA



AKSI #BERSIHKANINDONESIA

Sejumlah aktivis #BersihkanIndonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Selasa (15/12). Aksi mimbar ekspresi dan pameran karya fotografi tersebut untuk menyoroti serta menolak pengesahan revisi UU Minerba dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.